

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya 3 paket undang-undang yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bagi pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dimulai tahun 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam (5) lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Sebagai tindak lanjut dari amanat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tahun 2005 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut memuat mengenai standar bentuk dan isi serta cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diharapkan akan memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas pemerintah di bidang keuangan negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah disusun tersebut menganut basis akuntansi kas menuju akrual (*cash towards accrual basis*) di mana dalam beberapa aspek masih menganut basis kas, namun dalam aspek lainnya sudah menganut basis akrual. Jika ditinjau secara umum, sebagian besar Pernyataaan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dimuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005 sebenarnya sudah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Namun, amanat UU nomor 17 tahun 2003 cukup jelas bahwa dalam waktu lima tahun sejak UU tersebut diundangkan (tahun 2008) harus digunakan basis akrual penuh (*full accrual basis*).

Sampai dengan tahun 2008 penerapan akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan. Beberapa kendala dan masalah dalam penerapannya yaitu belum siapnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas di pemerintah pusat (kementerian/lembaga), serta belum siapnya peraturan dan sistem

yang mendukung pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Untuk mendukung pelaksanaan SAP berbasis akrual dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mendukung terbentuknya sumber daya manusia dengan mutu yang berkualitas, sehingga akan berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. Dengan memanfaatkan sistem informasi maka dapat menunjang aktivitas di setiap organisasi agar berjalan secara terus-menerus, karena adanya sistem informasi akan mempermudah pengguna sistem informasi dalam menyediakan informasi keuangan yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan.

Kebanyakan seseorang memanfaatkan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya, sesuai dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang merupakan dasar teori untuk memprediksi perilaku manusia. Diusulkan oleh (Fishbein dan Ajzen, 1975 dalam Jati dan Laksito, 2012) menganalisis hubungan antara berbagai kriteria kinerja dan sikap seseorang, niat dan norma subjektif (Sheppard et al, 1998, dalam Jati dan Laksito, 2012). TRA menunjukkan bahwa setiap individu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum mereka melakukan perilaku tertentu. Menurut teori ini, niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap perilaku dan norma subjektif. (Ajzen dan Madden, 1998 dalam Jati dan Laksito, 2012).

Dengan adanya *Theory of Reasoned Action* maka penelitian ini didesain dengan menggunakan beberapa variabel diantaranya adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial sebagai variabel independen dan minat pemanfaatan sistem informasi sebagai variabel dependen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Venkatesh *et al.*, 2003) difokuskan pada industri komunikasi, hiburan, perbankan, dan administrasi publik yang menggunakan sistem informasi secara wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Penelitian dilakukan untuk *me-review* dan menggabungkan beberapa model penerimaan sistem informasi dan menghipotesiskan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi sedangkan minat pemanfaatan sistem informasi dan kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi.

Ekspektasi kinerja diyakini bahwa seorang individu akan menggunakan sistem informasi apabila sistem tersebut dapat membantunya untuk meningkatkan kinerja. Menurut (Venkatesh *et al.*, 2003) mengungkapkan bahwa konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan *perceived usefulness*, motivasi intrinsik, job fit dan keuntungan relatif (*relative advantage*). Manfaat sistem bagi pemakainya adalah berkaitan dengan *productivity* (produktivitas), *job performance* atau *effectiveness* (kinerja tugas atau efektivitas), *importance to job*

(pentingnya bagi tugas) dan *overall usefulness* (kebermanfaatan secara keseluruhan).

Ekspektasi usaha merupakan tingkat kemudahan dalam penggunaan suatu sistem informasi. Menurut (Ventakesh *et al.*, 2003) akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam melakukan pekerjaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja maupun ekspektasi usaha mempunyai pengaruh kuat terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. Sementara itu menurut (Handayani, 2007) faktor sosial merupakan pengaruh dari lingkungan sekitar yang menyakinkan individu untuk menggunakan sistem informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya. Menurut (Ellyana dkk, 2009) Pemanfaatan sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (*degree of learning*) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi.

Adanya sistem informasi dapat memudahkan pemakai dalam penggunaannya, dan dapat mendukung kinerja sumber daya manusia agar memanfaatkan sistem informasi. Menurut (Davis, *et al.*, 1989

dalam Handayani, 2007) dengan adanya variabel kemanfaatan dan variabel kemudahan terdapat keterkaitan yang tinggi dan validitas yang telah diuji secara empiris. Perubahan kebijakan dari basis kas menuju akrual dan menjadi basis *full akrual*, membutuhkan penyesuaian dalam mengoperasikan sistem informasi. Menurut (Thompson et al., 1991 dalam Jati dan Laksito, 2012) dukungan dari teman sekerja, pimpinan dan organisasi mempunyai hubungan yang positif karena dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dalam suatu lingkungan akan dapat meningkatkan kemauannya untuk menggunakan sistem informasi yang baru. Dengan meyakini bahwa menggunakan sistem informasi itu akan dapat meningkatkan kinerja maka dapat memudahkan para pemakai untuk mengoperasikan sistem informasi tersebut agar menghasilkan informasi keuangan yang mempunyai akuntabilitas, keandalan, serta dapat dipahami, dan relevan.

Beberapa penelitian terkait dengan minat pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi pernah juga dilakukan oleh (Handayani, 2007), (Mahendra dan Affandy, 2013), (Ellyana, dkk 2009), (Hasyim, 2010). Ketiga peneliti tersebut melakukan penelitian pada instansi sektor privat dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian terkait dengan minat pemanfaatan sistem informasi dengan obyek sektor publik jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota

Surabaya. Dipilihnya objek penelitian pada organisasi sektor publik dikarenakan sektor ini sedang dituntut untuk bebenah dan menjadi perhatian masyarakat agar dapat menjadikan kinerjanya lebih baik dan transparan terutama dalam hal menghasilkan laporan keuangan. Dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan penilaian, serta masukan yang berguna untuk keberlangsungan sistem informasi pada sektor Pemerintahan, dan dapat memberikan penilaian terhadap sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dibidang sistem informasi.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi ?
2. Apakah ekspektasi usaha berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi ?
3. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh dari ekspektasi kinerja terhadap minat pemanfaatan sistem informasi.

2. Untuk menguji pengaruh ekspektasi usaha terhadap minat pemanfaatan sistem informasi
3. Untuk menguji pengaruh faktor sosial terhadap minat pemanfaatan sistem informasi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Akademis :

1. Memberikan kontribusi, masukan serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa yang selanjutnya akan melakukan penelitian dengan topik yang sama mengenai minat pemanfaatan sistem informasi, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dibidang pemerintahan.

Manfaat Praktis :

4. Memberikan kontribusi dan penilaian kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan agar kinerjanya lebih baik dan transparan terutama dalam hal keuangan, atas sistem informasi yang telah digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, statistik deskriptif, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.